

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Kebijakan umum adalah pernyataan hasil atau arah yang tidak perlu spesifik, namun dapat memberikan arah yang jelas dalam menentukan keputusan yang perlu diambil dalam penerapan kebijakan. Berdasarkan hal tersebut maka kebijakan umum pembangunan daerah adalah kebijakan yang memuat arah atau petunjuk, serta ketentuan-ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penentuan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selain itu, kebijakan umum pembangunan daerah dirumuskan untuk menunjukkan korelasi antara sasaran pembangunan daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab langsung terhadap pencapaian sasaran dimaksud. Kebijakan umum pembangunan daerah memuat komponen-komponen pelayanan, strategi dan arah kebijakan yang ditempuh, program, bidang urusan, serta tingkat pencapaian yang diharapkan. Kebijakan umum pembangunan daerah dirumuskan berdasarkan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah ditetapkan selama lima tahun.

Salah satu komponen terpenting kebijakan umum pembangunan daerah adalah program pembangunan. Program pembangunan didefinisikan sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan bersifat terukur. Oleh karena itu, setiap program pembangunan yang ditetapkan harus memiliki indikator kinerja yang dapat dinilai secara kuantitatif maupun kualitatif serta rasional untuk dicapai. Penetapan indikator kinerja disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD dan ketersediaan sumberdaya yang ada termasuk kemampuan pembiayaan. Indikator kinerja program merupakan penjabaran dari indikator komposit yang terdapat pada indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja program menggambarkan *outcome* yang ingin dicapai dan merupakan indikator komposit dari indikator kegiatan. Sementara itu, indikator kegiatan menggambarkan *output* atau hasil langsung yang ingin dicapai oleh suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut selesai dilakukan. Penetapan indikator kinerja program harus dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh unit kerja yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah. Penetapan indikator program harus didasarkan pada upaya pencapaian visi SKPD dan pencapaian misi pemerintah daerah yang tertuang di dalam RPJMD.

Selanjutnya, uraian kebijakan umum dan program pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel berikut :

Misi	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja		Program	Bidang Urusan	SKPD
				Kondisi Awal 2010	Kondisi Akhir 2015			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya toleransi antar umat beragama yang ditandai dengan tidak adanya kasus perselisihan antar umat beragama	Meningkatkan Kualitas, Pemahaman, Pengamalan Agama dan Kerukunan Umat Beragama	Jumlah Sarana Ibadah	386 Unit	466	Program Peningkatan Pengetahuan Keagamaan	Otda, Pemerintahan Umum, dst.	Sekretariat Daerah
			Jumlah Penduduk Beragama Islam	117.467 Orang	132.773			
			Jumlah Penduduk Beragama Kristen Khatolik	3.546 Orang	4.008			
			Jumlah Penduduk Beragama Hindu	609 Orang	688			
			Jumlah Penduduk Beragama Budha	7.238 Orang	8.181			
			Jumlah Penduduk Beragama Protestan	7.269 Orang	8.216			
			Jumlah Penduduk Beragama Lainnya	6.253 Orang	7.067			
Menciptakan kerukunan umat beragama secara fisik dan non fisik	Rasio tempat ibadah per 10.000 penduduk	30,87	33,00	Program Pemenuhan Kebutuhan Sarana Peribadatan	Otda, Pemerintahan Umum, dst.	Sekretariat Daerah		
	Jumlah kasus perselisihan antar umat beragama	1 Kasus	0	Program Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
	Terpenuhinya standar aturan ketenaga kerjaan	Meningkatkan perlindungan dan pengawasan sistem ketenagakerjaan	Persentase kasus PHK yang terselesaikan	45,45%	100	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenaga kerjaan	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja
			Persentase kecelakaan kerja yang menyebabkan luka berat dan kematian	1,4%	< 1			
			Besaran pemeriksaan perusahaan	24,00%	96,00			
			Besaran pengujian peralatan di perusahaan	100%	100			
		Menurunkan angka perselisihan pengusaha dan pekerja	Persentase kasus perselisihan pengusaha pekerja yang terselesaikan	48,00%	100	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	13,22%	5,75			
			Tingkat pengangguran terbuka	9,94%	8,00			
			Besaran pekerja / buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	88%	97			
			Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	54,5%	100			
	Menurunnya angka pengangguran terbuka dari 9,94% menjadi 8,00%	Meningkatkan Partisipasi Angkatan Kerja di sektor unggulan yang akan dikembangkan dan peluang kerja di sektor perikanan, pariwisata dan industri	Tingkat partisipasi angkatan kerja	65,75%	70,73	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja
			Persentase pencari kerja yang ditempatkan	28,18%	67,37			
		Meningkatkan peluang kerja bagi penduduk lokal di Kabupaten Bintan.	Rasio Penduduk yang bekerja	0,92	0,96	Program Peningkatan Lapangan Pekerjaan Sesuai Kapasitas Penduduk Lokal	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja
		Melanjutkan upaya peningkatan kapasitas tenaga kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	8,33%	13,64	Program Peningkatan Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja
			Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	- %	2,94			
			Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	- %	7,14			
			Rasio lulusan DIV/S1/S2/S3 per 10.000 penduduk	227	237			
			Rasio ketergantungan	48	44			
		Meningkatkan lapangan pekerjaan serta memberikan insentif untuk membuka lapangan pekerjaan	Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor wirausaha dan UKM	6206 Orang	6.566	Program Peningkatan Wirausaha dan UKM	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi, UKM dan Perindag
			Jumlah wirausaha/industri kecil yang diberikan insentif	50 Orang	300	Program Insentif Untuk Industri Kecil	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi, UKM dan Perindag

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Terpenuhinya standar/ketentuan nasional pendidikan anak usia dini serta pendidikan dasar dan pendidikan menengah	Meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Mempertahankan Rasio Guru-Muridnya	APK PAUD	32.1	35	Program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
			Rasio guru murid PAUD	1 : 9	1 : 9			
		Meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan Dasar	Indeks Pendidikan	82,97	83,35	Program Pendidikan Dasar (Wajib Belajar 9 Tahun)	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
			Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,91 Tahun	8,31			
			Angka partisipasi sekolah (Pendidikan Dasar)	99.20%	99.60			
			Rasio anak perempuan terhadap terhadap anak laki-laki ditingkat pendidikan dasar, lanjutan dan tinggi yang diukur dari angka partisipasi murni anak perempuan terhadap anak laki-laki	93,5%	95.5			
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	109,26%	105.00			
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	94,80%	93.25			
			Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI/Paket A	20.82%	25.00			
			Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs/Paket B	17.79%	22.00			
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	92,83%	94.00			
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	66,60%	67.50			
		Mempertahankan Pemenuhan Kebutuhan Penduduk akan Sekolah dan Guru Pendidikan Dasar	Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah dasar per 10.000 penduduk (Pendidikan Dasar)	57.96	62.00	Program Penyediaan dan Pemberdayaan Sekolah dan Prasarana Pendidikan Lain	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Persentase SD-SMP yang memiliki komputer yang bisa digunakan siswa untuk akses internet melalui komputer	73%		78					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Rasio guru per murid SD/MI (Pendidikan Dasar)	1:13	1:13	Program Penyesuaian dan Pemberdayaan Jumlah Guru	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
			Rasio guru per murid SLTP (Pendidikan Dasar)	1:12	1:12			
			Rasio guru per rombel di SD/MI	1:1,59	1: 1,59			
		Meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan Menengah	Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah menengah per 10.000 penduduk (Pendidikan Menengah)	23.26	28.00	Program Pendidikan Menengah	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
			Rasio guru per murid SLTA (Pendidikan Menengah)	1:11	1 : 11			
			Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata (Pendidikan Menengah)	0.81	0.31			
			Angka partisipasi sekolah (Pendidikan Menengah)	42.93%	45.50			
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	63,38%	80.97			
			Angka pendidikan yang ditamatkan SMA/SMK/MA/Paket C	28.58%	33.00			
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C	42,93%	70.00			
		Meningkatkan mutu pendidikan menengah yang berbasis kompetensi	Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Kelautan dan Perikanan	1 Unit	1	Program Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan / Pendidikan Tinggi Penunjang Sektor-Sektor Unggulan	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
			Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Pelayaran	1 Unit	1			
			Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Pariwisata	0 Unit	1			
			Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Perhotelan	0 Unit	1			
			Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Mesin	0 Unit	1			
		Menyediakan Fasilitas Pendidikan Informal	Angka Melek Huruf (AMH)	98,06%	99.50	Program Kejar Paket	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki usia 15-24 tahun yang diukur melalui angka melek huruf	102,63%	103			
		Meningkatkan Peran Pemuda dan Olahraga	Jumlah organisasi pemuda	104 Organisasi	114	Program Pelayanan Kepemudaan	Pemuda dan Olah Raga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
			Jumlah kegiatan kepemudaan	10 Kegiatan	24			
		Membina dan mengembangkan olah raga	Jumlah klub olahraga	366 Klub	381	Program Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga	Pemuda dan Olah Raga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
			Jumlah gedung olahraga	10 Unit	15			
			Jumlah organisasi olahraga	216 Organisasi	221			
			Jumlah kegiatan olahraga	10 Kegiatan	15			
			Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	10 Unit	11			
			Lapangan olahraga	18 Unit	23			
		Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Total guru bersertifikat profesi sesuai dengan kuota	384 Orang	884	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
			Persentase total guru bersertifikat profesi dari kuota yang tersedia	100%	100			
			Persentase guru TK bersertifikat profesi	0,26%	1			
			Persentase guru SD bersertifikat profesi	65,00%	70			
			Persentase guru SLTP bersertifikat profesi	18,75%	17			
			Persentase guru SLTA dan SMK bersertifikat profesi	11,20%	12			
			Persentase pengawas bersertifikat profesi	4,42%	0			
			Persentase Kelayakan Guru Mengajar SD	13,96%	100			
			Persentase Kelayakan Guru Mengajar SMP	72,35%	100			
			Persentase Kelayakan Guru Mengajar SLTA	96,79%	100			
			Angka kelulusan SD	97,90%	100			
			Angka kelulusan SLTP	93,29%	100			
			Angka kelulusan SLTA	99,51%	100			
			Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	42,57%	47			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian nilai seni dan budaya daerah	Meningkatkan sarana kesenian serta pembinaan dan perlindungan seni budaya daerah	Jumlah grup kesenian (yang dibina)	10 Grup	18	Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya, Seni dan Perfilman	Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			Jumlah gedung kesenian	1 Unit	3				
			Jumlah karya seni budaya yang memperoleh perlindungan hak kekayaan intelektual	0 Karya	4				
			Penyelenggaraan festival seni dan budaya	5 kali	7				
			Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	19 unit	21				
	Terlindunginya peninggalan sejarah dan warisan budaya melalui Peraturan Daerah	Penetapan Peraturan Daerah tentang perlindungan Benda, situs dan kawasan cagar budaya	Jumlah Perda perlindungan Benda, situs dan kawasan cagar budaya	0 Perda	1	Program Kesejarahan, Kepurbakalaan dan Permuseuman	Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			Jumlah situs, benda dan kawasan cagar budaya yang dilindungi dan dipelihara	1 Unit	6				
			Jumlah naskah sejarah / kuno yang diselamatkan dan dikelola	1 Naskah	15				
	Terpenuhinya pelayanan kesehatan sesuai standar	Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat, gizi serta kesehatan keluarga	Angka indeks kesehatan	74,50	75,30	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			Angka Usia Harapan Hidup	69,70 Tahun	70.50				
	Meningkatkan kesehatan keluarga			Angka Kelangsungan Hidup Bayi	99.01%	99.60	Program peningkatan gizi dan kesehatan keluarga	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Persentase balita gizi buruk	0.18%	< 1			
				Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	105,52	<100			
				Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	92,66%	>95,00			
				Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	9,85	3			
				Persentase balita gizi kurang	8,21%	<5			
				Persentase anak balita yang pendek (stunting)	36%	<32			
				Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%	100			
				Cakupan kunjungan bayi	106.44%	116			
Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani.	80,09%	80							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Angka kematian balita	9,85	3			
			Cakupan pelayanan Ibu Nifas	90,19%	90.00			
			Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4.	95,04%	100.00			
			Cakupan Pelayanan Anak Balita (minimal 8 kali)	64,09%	90.00			
			Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	11,96%	80.00			
			Persentase anak di bawah satu tahun yang diimunisasi campak	106,44%	100.00			
			Anak usia 12-23 bulan yang diimunisasi campak	106,44%	100.00			
		Meningkatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti dengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventif	Persentase desa/kel yang terkena KLB dilaksanakan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100	Program Pengendalian Penyakit	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Persentase desa yang mencapai UCI	94,12%	100			
			Angka penemuan kasus malaria per 1000 penduduk (API)	7 Kasus	<1			
			Persentase kasus TB paru (BTA positif) yang ditangani	100%	100			
			Persentase kasus DBD yang ditangani	100%	100			
			Persentase kasus Diare yang ditangani	100%	100			
			Persentase kasus Pneumonia yang ditangani	100%	100			
			Persentase pelayanan di klinik IMS dan HIV/AIDS	90%	100			
			Prevalensi malaria dan angka kematiannya	59,13% / 0	35 / 0			
			Angka penemuan penderita tuberkulosis BTA positif baru.	63,73%	50.00			
			Prevalensi tuberkulosis dan angka kematian penderita tuberkulosis dengan sebab apa pun selama pengobatan OAT per 100.000 penduduk	99,03 / 2,81	95,2 / 1,7			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Prevalensi HIV/AIDS	57.00%	52.00			
		Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan	Persentase rumah sehat	55%	80	Program Penyehatan Lingkungan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat	60%	>80			
			Persentase tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan	60%	80			
			Persentase tempat-tempat umum sehat	75%	85			
			Persentase penyakit berbasis lingkungan	55%	30			
			Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	90.87%	93.00			
			Meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan	Rasio Posyandu per 1000 balita	10.15			
		Posyandu aktif		70,70%	75.00			
		Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 100.000 penduduk		65.36	65.70			
		Rasio rumah sakit per 100.000 penduduk		0.70	1,41			
		Cakupan puskesmas		120%	120%			
		Cakupan pembantu puskesmas		80.56%	95.00			
		Meningkatkan kuantitas tenaga ahli kesehatan	Rasio dokter per 100.000 penduduk	64	69	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk	7.02	10			
			Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk	14.76	21			
			Rasio Perawat per 100.000 penduduk	101.84	126			
			Rasio Bidan per 100.000 penduduk	87.79	112			
			Jumlah bidan yang mendapatkan sertifikat Asuhan Persalinan Normal (APN)	67 Orang	87			
		Memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat miskin	Jumlah pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat miskin	486 Unit	783	Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi Masyarakat Miskin	Kesehatan	Dinas Kesehatan

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah pelayanan kesehatan rujukan bagi Usia Lanjut (USILA)	62 Unit	100			
			Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	90,3%	95.00			
			Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	100.00%	100.00			
			Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota.	44,83%	100.00			
		Mempromosikan pentingnya kesehatan kepada masyarakat	Persentase Desa yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)	60%	85	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Persentase SD/MI yang melaksanakan penjangkaran/pemeriksaan kesehatan	80%	>95			
			Persentase Desa Siaga Aktif	20%	>80			
			Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	94,35%	100.00			
		Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat, dan alat kesehatan serta menjamin keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan	Ketersediaan obat per kapita per tahun di sarana pelayanan kesehatan dasar	11.000 Butir	20.000	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Persentase penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan	60%	100			
			Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar	80%	100			
		Mengawasi dan membina peredaran obat	Persentase sarana distribusi/produksi dan penjualan obat/obat tradisional yang diawasi	42%	80	Program Pengawasan dan Pembinaan Peredaran Sediaan Farmasi dan Makanan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Meningkatkan Manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, berdaya guna dan berhasil guna	Jumlah puskesmas yang melaksanakan jaminan mutu (ISO)	1 Unit	5	Program Manajemen Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan

Misi	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja		Program	Bidang Urusan	SKPD
				Kondisi Awal 2010	Kondisi Akhir 2015			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Meningkatnya persentase koperasi aktif dari 79,15% menjadi 82,80% serta pertumbuhan rata-rata UMKM sebesar 3,77% pertahun	Memberdayakan koperasi dan UMKM serta Mengembangkan kewirausahaan UKM	Jumlah koperasi/koperasi aktif	206 /150 Unit	206 / 190	Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi, UKM dan Perindag
			Persentase koperasi aktif	72.82%	92.23			
			Jumlah UMKM Aktif	1327 Unit	1,577			
			Jumlah BPR/LKM aktif	2 Unit	3			
			Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	12 Unit	17	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		
			Jumlah wirausaha yang akan dikembangkan/ difasilitasi melalui pola pengembangan wirausaha lainnya	50 Orang	300			
			Jumlah wirausaha baru yang akan dikembangkan	25 Orang	50	Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri		
			Jenis barang beredar ber-SNI wajib yang diawasi	6 Jenis	22			
			Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat	100%	100			
			Persentase masyarakat yang memahami perlindungan konsumen	5%	25			
	Presentase isu/pengaduan konsumen yang ditangani	50%	100					
	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	20.19%	25.00	Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah	Perindustrian	Dinas Koperasi, UKM dan Perindag		
	Jumlah unit usaha industri kecil dan menengah	100 Unit	250					
	Jumlah unit usaha yang terkait dengan agroindustri dan industri hasil hutan	26 Unit	36					
Jumlah unit usaha yang terkait dengan pengolahan limbah industri	1 Unit	1						
Jumlah unit usaha yang terkait dengan industri kerajinan rumah tangga	6 Unit	16						
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	50.98%	55.00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		Meningkatkan kerjasama investasi di Kabupaten Bintan	Jumlah perijinan investasi yang dapat diproses dalam satu tahun	1712 Izin	1740	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Penanaman Modal/Pertanahan	BPIPPT		
			Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Adiministrasi pemerintah	Ada	Ada					
			Lama Proses Perizinan	3-14 hari	3-14					
			Penyelesaian izin lokasi	100%	100					
			Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	121/8 Investor	126/13	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	Penanaman Modal	BPIPPT		
			Jumlah nilai investasi perusahaan berskala nasional (PMA/PMDN) USD	USD 752.400.044	1,483,775,858	Program Pengawasan dan Pengendalian Investasi	Penanaman Modal	BPIPPT		
			Rasio daya serap tenaga kerja	176,93	200					
			Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN	Rp67.068.400.000	334.394.044.555					
			Jumlah kegiatan promosi/pameran penanaman modal daerah di dalam negeri	3 Kali	6	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal	BPIPPT		
			Jumlah kegiatan promosi/pameran penanaman modal daerah di luar negeri	1 Kali	5					
Jumlah perijinan non investasi yang dapat diproses dalam satu tahun	210 Izin	325	Program Pelayanan Perizinan Non Investasi	Penanaman Modal	BPIPPT					
	Terbentuknya kawasan minapolitan di 3 lokasi yang terletak di Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Mantang dan Kecamatan Bintan Timur	Mengembangkan kawasan minapolitan dan meningkatkan produktifitas sektor kelautan perikanan.	Persentase pengembangan kawasan minapolitan	5%	30	Program Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Bintan	Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan		
			Meningkatnya kontribusi sektor perikanan dalam PDRB sebesar 8%	Meningkatkan perekonomian dengan memanfaatkan potensi daerah	Pendapatan Per Kapita Nelayan	3.26 Juta	4	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Jumlah Nilai Eksport/tahun	9.5 M	23,6	Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Volume ekspor ikan segar segar/tahun	2.249 Ton	5,596			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Volume ekspor ikan hidup/tahun	6.635 Ton	16,500				
			Volume ekspor ikan hias	159.000 Ekor	395,642				
			Jumlah sentra pengolahan	3 Sentra	5				
			Volume produksi dari pelaku usaha perikanan	200 Ton	424				
		Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan sumberdaya kelautan	Jumlah Produksi perikanan tangkap (ton)	21.080,54 Ton	25,208	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Nilai Ekpor hasil perikanan tangkap	9.545 M	20				
			Volume Ekspor hasil perikanan tangkap	2.414,66 Ton	3.277,04				
				Volume produksi perikanan budidaya (Laut/Tawar/Payau)	362.27 Ton	410	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Budidaya	Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Luas lahan budidaya sesuai target produksi disertai data potensi yang akurat (Kolam, Tambak, Kantong Keramba)	80,56 Ha, 120,80 Ha, 1.507 Kantong	103, 149, & 1.923			
				Persentase wilayah pengelolaan perikanan bebas IUU fishing	50%	100	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Persentase wilayah perairan yang bebas kegiatan perusakan ekosistem perairan	70%	95			
				Persentase wilayah perairan yang bebas kegiatan pencemaran	30%	80			

Misi	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja		Program	Bidang Urusan	SKPD
				Kondisi Awal 2010	Kondisi Akhir 2015			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB dari 20,19% menjadi 25,00%	Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan	Jumlah pergelaran, pameran, festival karya seni budaya dan film	1 Kali	1	Program Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata	Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Jumlah kunjungan wisatawan	470,000 Orang	600,000	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Jumlah kunjungan wisatawan pada event pariwisata	15,500 Orang	38,500	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Lama tinggal wisatawan (hari)Mancanegara dan Nusantara	2 Hari	3				
		Pengeluaran wisatawan (harian) Mancanegara (USD) dan Nusantara	600USD/Rp3Jt	USD900/Rp4Jt				
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	20.19%	25.00				
		Jenis, kelas, dan jumlah restoran	134 Unit	136				
Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel	39 Unit	41						
	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dari 7.21% menjadi 7,70% dan Nilai Tukar Petani dari 105% menjadi 114%	Meningkatkan produksi tanaman perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura serta peternakan	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	7.21%	7.70	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	Pertanian	Dinas Pertanian dan Kehutanan
			Nilai tukar petani	105%	114			
			Capaian produksi komoditi unggulan perkebunan (Karet, Klp. Sawit, Kelapa, Cengkeh, Lada & jambu Mete)	24.513,98 Ton	25,298			
			Volume Ekspor Produk Perkebunan	5.188 Ton	6,375			
			Nilai Ekspor Produk Perkebunan	11.413,6 USD	14,425			
			Volume Ekspor Produk Hortikultura	0 Ton	598	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan	Pertanian	Dinas Pertanian dan Kehutanan
			Nilai Ekspor Produk Hortikultura	0 USD	4,162			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Meningkatkan produktifitas dan kualitas komoditas sektor peternakan	Jumlah Produksi Peternakan	8378,8 Ton	8,862	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Pertanian	Dinas Pertanian dan Kehutanan
			Nilai Produksi Hasil Peternakan (Rp. juta)	Rp. 137.056	146,540			
			Ketersediaan dan kecukupan daging yang aman, sehat, utuh dan halal	4.213,8 Ton	4,617	Ketersediaan dan Kecukupan Daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal	Pertanian	Dinas Pertanian dan Kehutanan
		Menyediakan dan mengembangkan prasarana dan sarana pertanian	Jumlah ternak yang diawasi	1.750 Ekor	2,905	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak	Pertanian	Dinas Pertanian dan Kehutanan
			Jumlah sarana dan prasarana pertanian, Perkebunan dan Peternakan	71 Unit	168	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Pertanian	Dinas Pertanian dan Kehutanan
			Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	24,17 Ton/Ha	25			
Meningkatnya Rata-rata pendapatan petani dari Rp1,35 juta menjadi Rp2,17 juta	Meningkatkan kapasitas kelembagaan, keterampilan dan pengembangan teknologi bagi petani dan nelayan	Jumlah kelembagaan petani (gapoktan)	17 Gapoktan	22	Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani	Ketahanan Pangan	BPPKP	
		Regulasi ketahanan pangan	Ada	Ada				
		Persentase ketersediaan pangan masyarakat	100%	100	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketahanan Pangan	BPPKP	
		Jumlah Lokasi Rawan Pangan	25 Lokasi	8				
		Jumlah petani dan nelayan yang terlatih	2500 Orang	2,900	Program Pengembangan dan Penyuluhan Petani dan Nelayan	Ketahanan Pangan	BPPKP	
		Jumlah petani yang memiliki kemampuan teknis SL PHT	0 Orang	300				
		Jumlah Teknologi tepat guna yang ditemukan	2 Teknologi	7	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	Ketahanan Pangan	BPPKP	

Misi	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja		Program	Bidang Urusan	SKPD
				Kondisi Awal 2010	Kondisi Akhir 2015			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Meningkatnya kualitas pelayanan teknis administratif bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan regulasi yang berlaku	Meningkatkan kapasitas, ketatalaksanaan dan kelembagaan daerah	Jumlah SKPD yang telah menerapkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur.	0 SKPD	36 skpd /36 desa /15 kelurahan	Program Penataan, Ketatalaksanaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah	Otda, Pemerintahan Umum, dst.	Sekretariat Daerah
			Jumlah SKPD yang menerapkan SMM ISO 9001:2008	10 SKPD	12			
		Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tentang Pelayanan Aparatur	72,46	> 81,26	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Otda, Pemerintahan Umum, dst.	Sekretariat Daerah
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tentang Pelayanan Umum di Kecamatan	72,34	> 81,26			
	Meningkatnya Kompetensi sumberdaya aparatur dari 40% menjadi 80%	Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur	Kompetensi sumberdaya aparatur	40%	80	Program Pendidikan Kedinasan	Otda, Pemerintahan Umum, dst.	Badan Kepegawaian Daerah
			Kompetensi fungsional para pejabat fungsional	40%	80			
			Kompetensi Teknis Umum para PNS	40%	80			
			Kompetensi dsr para CPNS	40%	80			
			Efektifitas Diklat Prajabatan, Struktural, Fungsional, dan Teknis Umum	20%	80			
Meningkatnya efektifitas pengelolaan administrasi kepegawaian daerah dari 76,66% menjadi 86,66%	Meningkatkan efektifitas pengelolaan administrasi kepegawaian daerah	Efektifitas pengambilan keputusan kenaikan pangkat PNS	100%	100	Program Peningkatan Administrasi dan Mutasi Kepegawaian Daerah	Otda, Pemerintahan Umum, dst.	Badan Kepegawaian Daerah	
		Efektifitas pengambilan keputusan demosi, mutasi dan promosi jabatan PNS	50%	80				
		Efektifitas pengambilan keputusan pengadaan formasi	80%	80				
Meningkatnya kinerja aparatur dari 40% menjadi 80%	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan sumberdaya aparatur	Disiplin pegawai	40%	80	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Otda, Pemerintahan Umum, dst.	Badan Kepegawaian Daerah	
		Kepuasan kerja pegawai	50%	80				
		Kesejahteraan pegawai	50%	80				
		Kinerja pegawai	40%	80				
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja pemerintah daerah yang ditandai dengan opini LAKIP Daerah dari C menjadi A	Meningkatkan kualitas aparatur pengawasan dan pembinaan akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah	Persentase jumlah temuan BPK yang ditindak lanjuti	100%	100	Program Pengawasan dan Pengendalian Internal dan Eksternal	Otda, Pemerintahan Umum, dst.	Inspektorat

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Persentase jumlah temuan internal yang ditindak lanjuti	100%	100				
		Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas aparatur	Hasil evaluasi Kemenpan/BPKP atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Bintan	C	A	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	Otda, Pemerintahan Umum, dst.	Inspektorat	
			Persentase SKPD yang mencapai nilai LAKIP baik	30%	70				
			Persentase auditor bersertifikasi	16.67%	100				
			Pendapat terhadap Review Laporan Keuangan Pemda	B	A	Program Pembinaan dan Pengawasan serta Peningkatan Akuntabilitas Pembangunan Daerah	Otda, Pemerintahan Umum, dst.	Inspektorat	
	Meningkatnya penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil dari 64,40% menjadi 85%	Meningkatkan jumlah jaringan sistem kependudukan di seluruh kecamatan	Tingkat koneksi data kependudukan antar kecamatan serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	5 Jaringan	11	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
				Rasio penduduk ber KTP per 1000 penduduk telah menikah	601 Orang				725
				Kepemilikan KTP	92,36%				97,00
				Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Belum				Sudah
			Menyusun data dan informasi kependudukan yang akurat serta meningkatkan pelayanan kependudukan dan catatan sipil	Rasio bayi berakte kelahiran per 100 Bayi Lahir	46 Orang	70	Program Penataan Administrasi Catatan Sipil	Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
				Rasio pasangan berakte nikah per 1000 pasangan penduduk menikah	1,75 pasang	6			
				Kepemilikan akta kelahiran penduduk	59,81%	100			
				Persentase penduduk yang belum memiliki akte kelahiran	40,19%	20.19	Program Pengawasan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
				Persentase penduduk yang terdata ganda	4.33%	0.85			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Persentase penduduk yang belum memiliki dokumen perkawinan (muslim dan non muslim)	33.56%	23			
	Meningkatnya kinerja pemerintah dalam penyelesaian permasalahan di masyarakat dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku	Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan	Jumlah Kecamatan yang dimekarkan	4 Kecamatan	6	Program Penataan dan Pembinaan Pemerintahan Umum dan Daerah Bawahan	Otda, Pemerintahan Umum, dst.	Sekretariat Daerah
			Jumlah desa/kel yang dimekarkan	9 Desa dan 8 Kelurahan	14 Desa dan 13 Kelurahan			
			Jumlah daerah bawahan yang ditetapkan tapal batas	5 Kecamatan	10			
			Opini Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD)	Masuk 10 besar	Masuk 10 besar			
			Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	100%	100			
			Sistim Informasi Manajemen Pemda	10	10			
			Persentase unit pelayanan pemerintahan (Kecamatan/Desa yang memiliki komputer dan bisa mengakses internet melalui komputer	82%	86			
			Pemanfaatan sistem informasi manajemen dalam pengelolaan pemerintahan	Ya	Ya			
		Menata peraturan perundang-undangan	Persentase/jumlah kasus hukum antar pemerintah yang diselesaikan	0%	100	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Otda, Pemerintahan Umum, dst.	Sekretariat Daerah
			Persentase/jumlah kasushukum antar pemerintah dengan pihak ketiga yang diselesaikan	100%	100			
			Persentase/ jumlah kasus hukum antar pemerintah dengan masyarakat yang diselesaikan	100%	100			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Jumlah Ranperda yang diajukan	10 Perda	9				
			Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	4 Perda	8				
			Persentase Ranperda menjadi Perda yang disahkan	100%	100				
		Menata pemanfaatan dan pemilikan lahan	Luas Lahan Milik Pemerintah Daerah	± 365 Ha	± 430	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		Otda, Pemerintahan Umum, dst.	Sekretariat Daerah
			Persentase Lahan Pemda yang tidak bersertipikat dengan bersertipikat	70%	20				
			Jumlah sertifikat (persil) lahan pemda	20 Sertifikat	60				
			Persentase lahan pemda yang belum dimanfaatkan	50%	0				
			Persentase Sengketa lahan yang terselesaikan	69%	100				
		Meningkatkan kualitas sistem administrasi perekonomian dan pembangunan	Jumlah MOU/perjanjian kerjasama bidang perekonomian yang dihasilkan	0 MOU	2	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian		Otda, Pemerintahan Umum, dst.	Sekretariat Daerah
			Jumlah Pengawasan yang terkait dengan kebijakan perekonomian daerah	200 Perusahaan	400				
		Membina BUMD	Jumlah BUMD yang beroperasi	2 BUMD	3	Program Pembinaan BUMD		Otda, Pemerintahan Umum, dst.	Sekretariat Daerah
			Kontribusi BUMD terhadap PAD	3.85%	5				
			Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah	11.6 Milyar	14				
			Jenis dan jumlah bank dan cabang	8 Unit	8				
		Meningkatkan sistem administrasi pembangunan daerah	Efisiensi anggaran sebagai dampak penerapan LPSE	0%	50	Program Peningkatan Administrasi Pembangunan Daerah		Otda, Pemerintahan Umum, dst.	Sekretariat Daerah
			Persentase penyelesaian masalah yang terkait dengan pelaksanaan administrasi pembangunan daerah	0%	100				
		Meningkatkan kualitas sistem administrasi umum	Persentase peliputan kegiatan pemerintah daerah	90%	100	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik dan Keprotokolan		Otda, Pemerintahan Umum, dst./ Komunikasi dan Informasi	Sekretariat Daerah
			Persentase pelayanan keprotokolan yang telah distandarisasi	0%	100				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Persentase pelaksanaan pelayanan keprotokolanan yang sesuai dengan standar	0%	100			
			Jumlah pengunjung MCAP	0 Orang	14500			
			Jumlah surat kabar nasional/lokal	6 /13 Jenis	6 /13			
			Jumlah penyiaran radio/TV lokal/nasional	0 /2/9 Jenis	1/2/9			
			Web site milik pemerintah daerah	16 Situs	21			
			Persentase pelayanan kerumahtanggaan yang telah distandarisasi	0%	100	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Otda, Pemerintahan Umum, dst.	Sekretariat Daerah
			Persentase pelaksanaan pelayanan kerumahtanggaan yang sesuai dengan standar	0%	100			
	Meningkatnya pembinaan masyarakat di kecamatan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan kemasyarakatan	Jumlah majelis taklim yang dibina	22 Kelompok	23	Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan	Otda, Pemerintahan Umum, dst.	Kecamatan
			Jumlah atlit yang dibina	434 Orang	730			
			Jumlah Lasqi yang dibina	24 Kelompok	25			
			Jumlah sanggar seni yang dibina	26 Kelompok	42			
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan kecamatan dari 90% menjadi 100%	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musrenbang	Partisipasi masyarakat dalam musrenbang	90%	100	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Otda, Pemerintahan Umum, dst.	Kecamatan
	Meningkatnya produk legislasi daerah yang disahkan dari 63,64% menjadi 100%	Meningkatkan kualitas anggota legislatif dan kapasitas lembaga DPRD	Persentase Ranperda yang disahkan	63.64%	100	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Otda, Pemerintahan Umum, dst.	Sekretariat DPRD
			Persentase kehadiran anggota legislatif dalam pembahasan ranperda	80%	100	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Otda, Pemerintahan Umum, dst.	Sekretariat DPRD
			Persentase laporan/pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	75%	100			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Persentase kehadiran anggota legislatif dalam rapat paripurna	80%	100			
Meningkatnya kesesuaian muatan perencanaan daerah dengan implementasi nya dari 70% menjadi 90%	Meningkatkan kualitas data perencanaan daerah	Jumlah Jenis Data Daerah	252 Jenis	317	Program Pengembangan Data dan Informasi	Statistik	Bappeda	
		Jumlah jenis data pokok kecamatan	30 Jenis	92				
		Persentase desa dan kelurahan yang memiliki data pokok	0%	100				
		Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada	Ada				
		Buku PDRB Kabupaten	Ada	Ada				
	Meningkatkan kapasitas perencanaan spasial	Jumlah Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)	1 Perda	1	Program Perencanaan Tata Ruang	Penataan Ruang	Bappeda	
		Jumlah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	2 Dokumen	7				
		Luas wilayah produktif	31,65%	36				
		Luas wilayah industri	38,07%	43				
		Luas wilayah banjir	0,1%	0,04				
		Luas wilayah kekeringan	0%	0				
		Luas wilayah perkotaan	17,94%	22				
	Meningkatkan perencanaan dan pengendalian pembangunan SDA	Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang di kawasan strategis dan Kecamatan	40%	75	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Penataan Ruang	Bappeda	
		Persentase rekomendasi perizinan yang memanfaatkan kesesuaian lahan	40%	75				
		Tingkat Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (Ketaatan terhadap RTRW)	50%	85				
Meningkatkan perencanaan dan pengendalian pembangunan SDA	Jumlah Fasilitas Perdes yang diterbitkan	3 Desa	4	Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan SDA	Perencanaan Pembangunan	Bappeda		
	Frekuensi Pemantauan, Evaluasi dan Penilaian Pertambangan Umum	21 Kali	21					
	Jumlah Database SDA yang tersedia	0 Data Base	5	Program Inventarisasi SDA	Perencanaan Pembangunan	Bappeda		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Meningkatkan kapasitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Tingkat kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan dilapangan	100%	100	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
			Persentase hasil capaian output program kegiatan	90%	100			
			Tingkat validasi laporan bulanan SKPD	60%	100			
			Opini terhadap Laporan Masa Jabatan Bupati	Diterima	Diterima			
		Meningkatkan kualitas lembaga dan tenaga perencana daerah	Jumlah tenaga perencana yang terlatih	92 Orang	472	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
		Meningkatkan kemampuan perencanaan daerah bawahan	Persentase desa yang menyelesaikan Dokumen RPJMDes	0%	100	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bawahan	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
			Jumlah Alokasi Dana Desa (DAU Desa)	7.3 Milyar	11,0			
			Jumlah DAK Desa dan Kelurahan	13 Milyar	10,0			
			Persentase Prasarana aparatur pemerintahan dan publik yang dipetakan	45%	95			
			Persentase pertumbuhan Pendapatan Desa terhadap DAU Desa	0%	100			
			Kebijakan pengelolaan PAD desa dan sumber keuangan Desa	0 Kebijakan	1			
			Tingkat kesesuaian perencanaan ADD dengan pelaksanaan dilapangan	100%	100			
			Mempertahankan keberhasilan perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Tdk Ada			
		Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA		Ada	Ada			
		Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA		Ada	Ada			
		Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD		90%	90			
		Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan		100%	100			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Partisipasi SKPD dalam Forum SKPD	100%	100			
			Partisipasi masyarakat dan SKPD dalam Musrenbang Kabupaten	100%	100			
			Persentase kesesuaian usulan rencana pembangunan dengan kondisi eksisting	85%	100			
			Persentase SKPD yang menyusun Rencana Strategis	100%	100			
		Meningkatkan pembangunan ekonomi daerah	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	< 4	< 4	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
			Pendapatan Per Kapita	25.30 Juta	30.00			
			Indeks Daya Beli	79.61	80.10			
			Peran APBD terhadap PDRB	19,12%	22.50			
			Peran PAD terhadap Belanja Daerah	22,08%	27			
			Pertumbuhan PDRB (LPE)	5.56%	6.27			
			Laju inflasi	4,48%	< 6			
			PDRB per kapita	31.10 Juta	34.11			
			Indeks Gini	0.285	0.19			
			Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	0.50%	0.35			
			Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per bulan	Rp733,903	790,000			
			Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	51.04%	62.00			
			Produktivitas total daerah	Rp76,18 Juta	126			
		Meningkatkan pembangunan manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75.03	76,06	Program Perencanaan Sosial Budaya	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
	Meningkatnya kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanganan awal bencana	Menyediakan rencana aksi penanggulangan bencana daerah serta peningkatan kepedulian masyarakat dalam menghadapi bencana	Jumlah dokumen rencana aksi penanggulangan bencana daerah	0 Dokumen	1	Program Penanggulangan Bencana	Otda, Pemerintahan Umum, dst.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah lokasi titik rawan bencana	50 Lokasi	10			
			Tingkat partisipasi satgas/relawan dalam penanggulangan bencana	0%	100			
			Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	100%	100			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Menangani kejadian bencana sosial	Persentase kejadian bencana sosial yang ditangani	100%	100	Program Mitigasi Bencana	Otda, Pemerintahan Umum, dst.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Membaiknya opini laporan keuangan daerah dari WDP menjadi WTP	Meningkatkan mutu laporan keuangan dan ketaatan terhadap standar pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WDP	WTP	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Otda, Pemerintahan Umum, dst.	DPPKD
			Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	90%	90			
			Nilai Silpa	10%	10			
			Regulasi Perbup tentang pola pengelolaan BLUD	1 Perbup	2			
			Ketaatan terhadap standar akuntansi keuangan	60%	85			
			Ketaatan bendahara terhadap tertib penatausahaan keuangan daerah	60%	90			
			Opini DPRD terhadap Laporan keuangan akhir masa tugas	-	diterima			
			Persentase SKPD yang menyampaikan laporan tepat waktu	55%	100			
			Tingkat kepatuhan SKPD terhadap sisdur keuangan daerah	55%	90			
			Tingkat kepatuhan SKPD terhadap kebijakan akuntansi keuangan daerah	55%	90			
			Tingkat kepatuhan SKPD terhadap jadwal retensi arsip (JRA Keuangan Daerah)	50%	75			
			Peraturan Bupati tentang JRA	0 Perbup	1			
			Regulasi tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah	0 Regulasi	2			
			Persentase defisit anggaran terhadap PDRB	3%	3			
			Persentase belanja publik dan aparatur terhadap total belanja daerah	60% : 40%	60 : 40			
			Pendapatan hasil manajemen kas	6 Milyar	8			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Tingkat kepatuhan SKPD terhadap pedoman Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran	80%	95			
			Daya Serap Keuangan Desa / APBDes	85%	97	Program Pembinaan Fasilitas Keuangan Kabupaten / Kota	Otda, Pemerintahan Umum, dst.	DPPKD
			Persentase desa yang memiliki LKPDDes baik	60%	90			
			Tingkat ketertiban pengelolaan barang daerah	50%	100	Program Manajemen Aset Daerah	Otda, Pemerintahan Umum, dst.	DPPKD
			Opini Kewajaran Nilai aset daerah	WDP	WTP			
			Persentase Aset Daerah yang telah dinilai	90%	100			
			Tingkat Kesesuaian Neraca Aset	85%	100			
			Tingkat Pengamanan Aset Daerah	10.0%	33			
			Jumlah aset tanah yang disertifikasi	3 Aset	15			
			Jumlah Pendapatan asli daerah	119,45 M	201			
Meningkatnya penerimaan daerah sebesar 60,4% yaitu dari 429,63 miliar menjadi 711,25 miliar	Meningkatkan penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak		Jumlah dana perimbangan	287.02 M	469			
			Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah	23.16 M	42			
			Persentase Ketaatan Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban	50.57%	56			
			Jumlah objek pajak dan retribusi daerah	7/15 Objek	11/28			
			Persentase pencapaian target penerimaan pajak daerah	100%	100			
			Jumlah Wajib Pajak yang di Verifikasi	13 WP	130			
			Jumlah Pajak dan Retribusi yang dikaji tarifnya	30/11 Jenis	0			
			Jumlah Database wajib pajak	2,971 WP	43,373			
			Realisasi Penerimaan PBB (dalam juta)	9,733 Juta	15,675			
			Jumlah WP PBB	41.268 WP	66,463			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah SPPT PBB yang disampaikan	41.268 Paket	66,462			
			Persentase WP yang membayar PBB	27%	60			
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dari 49,40% menjadi 60%	Mengembangkan wawasan kebangsaan dan kesadaran politik masyarakat	Persentase pelajar yang dibekali wawasan kebangsaan	11.76%	25.81	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Partisipasi pemilih dalam pemilihan anggota DPD	56.84%	65	Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Partisipasi pemilih dalam pemilihan anggota DPR RI	56.84%	65			
			Partisipasi pemilih dalam pemilihan anggota DPRD	56.84%	65			
			Partisipasi pemilih dalam pemilihan Presiden	66.95%	70			
			Partisipasi pemilih dalam pemilihan Bupati	75%	80			
			Partisipasi pemilih dalam pemilihan Gubernur	59.92%	65			
			Persentase LSM legal di daerah	66%	66			
			Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	5 Kegiatan	5			
			Kegiatan pembinaan politik daerah	2 Kegiatan	2			
	Menurunnya indeks kriminalitas dari 112 menjadi 105	Mengendalikan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan peraturan daerah	Angka kriminalitas yang tertangani	7.69	5.00			
			Persentase demonstrasi legal	90%	100			
		Mengembangkan kapasitas penegak hukum	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	12.51	17	Program Penegakan Peraturan Daerah dan Pengembangan Kapasitas Pol PP	Otda, Pemerintahan Umum, dst.	Satuan Polisi Pamong Praja
		Membina masyarakat untuk ketahanan dan perlindungan	Rasio Linmas per 10.000 penduduk	63,89	72	Program Pembinaan Potensi Ketahanan dan Perlindungan Masyarakat	Otda, Pemerintahan Umum, dst.	Satuan Polisi Pamong Praja
			Rasio Poskamling per desa/kelurahan	1,08	1,27			
			Persentase Poskamling yang aktif	0%	90			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	909 Orang	1000			
			Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota	149%	149			
	Meningkatnya persentase kearsipan daerah dari 5% menjadi 80% dan berkembangnya minat baca masyarakat	Meningkatkan dan Mengembangkan Kapasitas Lembaga Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Persentase Arsip Vital yang diduplikasi (8 objek)	5%	80	Program Penyelenggaraan Kearsipan Daerah	Kearsipan	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Jumlah gedung arsip daerah yang representatif			0 Unit	1				
Pengelolaan arsip secara baku			60%	85				
Peningkatan SDM pengelola kearsipan			2 Keg	4				
		Mengembangkan perpustakaan daerah	Jumlah perpustakaan daerah	1 Unit	2	Program Pengembangan Perpustakaan	Perpustakaan	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Jumlah taman bacaan/ perpustakaan Kelurahan dan Desa			25 Unit	35				
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun			3410 orang	21100				
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah			8405 Judul	11000				
Meningkatnya kapasitas pelayanan aparatur sesuai standar	Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana, sumber daya manusia, dan kinerja aparatur	Disesuaikan masing-masing SKPD	Disesuaikan masing-masing SKPD	Disesuaikan masing-masing SKPD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Disesuaikan masing-masing SKPD	Seluruh SKPD	
		Disesuaikan masing-masing SKPD	Disesuaikan masing-masing SKPD	Disesuaikan masing-masing SKPD	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Disesuaikan masing-masing SKPD	Seluruh SKPD	
		Disesuaikan masing-masing SKPD	Disesuaikan masing-masing SKPD	Disesuaikan masing-masing SKPD	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Disesuaikan masing-masing SKPD	Seluruh SKPD	
		Disesuaikan masing-masing SKPD	Disesuaikan masing-masing SKPD	Disesuaikan masing-masing SKPD	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Disesuaikan masing-masing SKPD	Seluruh SKPD	
		Disesuaikan masing-masing SKPD	Disesuaikan masing-masing SKPD	Disesuaikan masing-masing SKPD	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Disesuaikan masing-masing SKPD	Seluruh SKPD	

Misi	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja		Program	Bidang Urusan	SKPD
				Kondisi Awal 2010	Kondisi Akhir 2015			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Meningkatnya kuantitas dan kualitas jaringan jalan, jembatan, dan drainase	Membangun dan Merehabilitasi Jalan, Jembatan, Drainase dan Gorong-Gorong	Persentase tingkat kemantapan jalan	80%	95	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
			Panjang jalan tanah yang dibangun (Lintas Timur dan Jalan Strategis Lainnya)	0 Km	26.5			
			Panjang jalan aspal dibangun dan ditingkatkan	5.25 Km	63.05			
			Jumlah jembatan yang dibangun	0 Unit	4			
			Jumlah penggantian jembatan	0 Unit	4			
			Panjang jalan dilalui roda 4	415,75 Km	443,75			
			Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	215.5 Km	240			
		Memelihara jalan dan jembatan	Panjang jaringan jalan yang dipelihara	100 Km	252.4	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
			Jumlah jembatan yang dipelihara	4 Unit	14			
		Meningkatkan sistem drainase	Persentase drainase jalan yang terbangun	10.00%	12.5	Program Pembangunan Drainase dan Gorong-Gorong Jalan	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
			Jumlah panjang saluran drainase permukiman yang dibangun	1090 Meter	1250	Program Penyehatan Lingkungan Permukiman	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
		Mengembangkan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman	Persentase kawasan permukiman yang tertata (Total 40 Ha)	0%	50	Program Pengembangan Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
		Mengembangkan pelayanan air minum dan air limbah	Jumlah Sambungan Rumah (SR) perdesaan yang terpasang	76 SR	1576	Program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Air Limbah	Perumahan	Dinas Pekerjaan Umum
			Jumlah Sambungan Rumah (SR) perkotaan yang terpasang	SR	1800			
Proporsi cakupan pelayanan perusahaan daerah air minum	0,51%		0,56					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	90.87%	93.00			
			Persentase rumah tinggal bersanitasi	72.66%	77.00			
		Mengendalikan dampak banjir	Persentase penanganan abrasi pantai (Total 2.900M)	13%	100	Program Pengendalian Banjir	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
		Meningkatkan perencanaan teknis dan domena rencana bidang kepekerjaan umum	Persentase Dokumen Perencanaan teknis dihasilkan (Total 81 Dokumen)	12%	100	Program Peningkatan Perencanaan Teknis	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
			Jumlah kebijakan dan regulasi bidang pekerjaan umum yang disusun	3 Kebijakan	6			
		Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana umum dan aparatur pemerintahan	Jumlah sarana fasilitas umum dan sosial yang dibangun dan ditingkatkan	5 Sarana	22	Program Pembangunan dan Peningkatan Prasarana dan Sarana Umum/Sosial	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
			Jumlah Prasarana dan sarana aparatur yang dibangun	0 Sarana	23	Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
		Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana ibukota	Persentase gedung pemerintahan yang dibangun	35%	95	Program Pembangunan Sarana Kantor Pemerintahan Ibukota	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
			Jumlah sarana penunjang perkantoran	5 Jenis / 5 Dinas	10/10			
			Jumlah panjang jaringan jalan	415,75 Km	443,75	Program Pembangunan Infrastruktur Pusat Pemerintahan	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
			Jumlah jembatan pusat pemerintahan ibukota	1 Unit	1			
			Jumlah panjang normalisasi saluran/ sungai	0 Meter	2400			
			Jumlah panjang saluran drainase pusat pemerintahan	0 Meter	10600			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah sarana air minum pusat pemerintahan	0 Unit	1			
			Jumlah jaringan utilitas pusat pemerintah	0 Meter	3,280			
			Kapasitas peralatan bidang kepekerjaan umum	60%	85	Program Peningkatan Kapasitas Bidang Kepekerjaan Umum	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
			Kualitas pengujian bidang kepekerjaan umum	60%	85			
		Merekonstruksi dan merehabilitasi sarana prasarana terkena bencana	Persentase Rekonstruksi Sarana Prasarana Bidang Sosial dan Ekonomi	0%	40	Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana Daerah	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
			Persentase Rehabilitasi Sarana Prasarana Bid. Sosial-Ekonomi	0%	40			
		Meningkatkan kapasitas prasarana penerangan jalan umum	Jumlah lampu jalan yang telah terpasang	406 Unit	806	Program Peningkatan Prasarana Penerangan Jalan Umum	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
			Persentase titik penerangan jalan umum yang dipelihara	30%	30			
Meningkatnya rumah tangga yang terlayani kebutuhan listrik dari 60,38% menjadi 65%	Menyediakan jaringan dan pembangkit listrik bagi masyarakat	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	60,38%	65,00	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Energi dan Sumber Daya Mineral / Perumahan	Dinas Pertambangan dan Energi	
			Rumah tangga pengguna listrik (termasuk sosial, bisnis, publik)	15.718 RT				16.718
			Total panjang jaringan SUTM	18.800 Meter				43.800
			Rasio elektrifikasi listrik desa	76,92%				81
			Jumlah unit Genset/KVA	70 Unit/4.005 KVA				116/7.005
			Rasio ketersediaan daya listrik	67,00%				96,50
Tersedianya prasarana dan sarana perhubungan yang memenuhi standar	Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Rasio izin trayek per 100.000 penduduk	3,51	4,00	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Perhubungan	Dinas Perhubungan	
		Jumlah APILL yang terpasang	11 APILL	18				
		Jumlah Warning Light yang terpasang	3 WL	30				
		Jumlah dermaga/pelabuhan rakyat dan ruang tunggu yang dibangun	32 Unit	47	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Perhubungan	Dinas Perhubungan	
		Jumlah terminal angkutan darat yang dibangun	1 Terminal	5				
		Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	8 Unit	10				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,034	0,08			
			Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	96.778 Orang	106.000			
			Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun :					
			- Jumlah penumpang yang masuk Pelabuhan	602.028 Orang	664.687			
			- Jumlah penumpang yang keluar Pelabuhan	612.216 Orang	675.935			
			- Jumlah penumpang yang masuk Terminal Angk. Darat	300 Orang	450			
			- Jumlah penumpang yang keluar Terminal Angk. Darat	1600 Orang	1880			
		Meningkatkan kualitas kebijakan bidang perhubungan	Jumlah kebijakan dan regulasi Bidang Perhubungan yang disusun	1 Kebijakan	5	Program Peningkatan Perencanaan Teknis dan Kebijakan Bid. Perhubungan	Perhubungan	Dinas Perhubungan
		Meningkatkan pelayanan angkutan umum	Jumlah pengujian kendaraan bermotor (uji KIR angkutan umum)	1415 Kali	1465	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Perhubungan	Dinas Perhubungan
			Kepemilikan KIR angkutan umum	116,2%	100			
			Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	2 Jam	2			
			Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	Rp38000-45000	Rp38000-45000			
		Meningkatkan konsolidasi dan koordinasi kepada institusi jasa pos dan telekomunikasi	Jumlah jaringan komunikasi	6 Provider	6	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pos dan Telekomunikasi	Perhubungan	Dinas Perhubungan
			Persentase pengendalian perizinan bidang pos dan telekomunikasi	5%	100			
			Persentase wilayah yang tercakupi jaringan operator selular	47%	80			
			Jumlah jaringan komunikasi	1,14	1,14			
			Rasio wartel/warnet terhadap 10.000 penduduk	3,5	4,8			
		Meningkatkan pembinaan dan pengawasan bidang kebandarudaraan	Frekwensi penerbangan per thn	0 Kali	12	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kebandarudaraan	Perhubungan	Dinas Perhubungan
			Jumlah penumpang penerbangan	0 Orang	216			

Misi	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja		Program	Bidang Urusan	SKPD
				Kondisi Awal 2010	Kondisi Akhir 2015			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Menurunnya persentase penduduk miskin dari 11% menjadi 8%	Menurunkan Jumlah Penduduk Miskin dan meningkatkan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	92,73%	95,00	Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Sosial	Dinas Sosial
			Persentase penduduk dengan pendapatan dibawah U\$5 1 (PPP) per hari	7,27%	5,00			
			Persentase penduduk dengan tingkat konsumsi dibawah garis kemiskinan nasional	5,67%	5,17			
			Persentase rumah tangga miskin	23,64%	22,49			
			Rasio rumah tidak layak huni	1 : 256	0 : 142.382			
			Jumlah kelembagaan kesejahteraan sosial	74 Lembaga	84			
			Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	5 Unit	7			
	Menurunnya persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial dari 6,98% menjadi 6,21%	Meningkatkan bantuan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah PMKS	9940 Jiwa	8,841	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinas Sosial
			Jumlah PMKS yang mendapat bantuan sosial	2478 Jiwa	3,578			
			Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	24,93%	36			
		Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	1151 Jiwa	5,201	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sosial	Dinas Sosial
			Persentase masyarakat yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	0,81%	3,65			
		Meningkatkan kompetensi pekerja sosial dan tenaga kerja kesejahteraan sosial	Persentase pekerja sosial dan tenaga kerja kesejahteraan sosial yang kompeten/terlatih (terkait tenaga kerja)	3%	16	Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinas Sosial
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dari 10% menjadi 11,2%	Mengembangkan dan Memberdayakan masyarakat pedesaan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam PNPMM	10% (14.500)	11,2 (15.550)	Program Peningkatan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana	
		Rasio Raskin	23,5	19,5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah Teknologi Tepat Guna (TTG) yang berhasil di temukan	3 TTG	12			
			Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan TNI-AD	15%	21			
			Jumlah kelompok binaan LPM	1	1			
			Jumlah LSM Aktif	35 Lembaga	43			
	Meningkatnya Indeks kesetaraan gender dari 24,45 menjadi 30,1	Meningkatkan Indeks kesetaraan gender	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	1.71	1.90	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
			Jumlah PKK aktif	484 kelompok	489			
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (eksekutif)	24.46%	30.1			
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	13%	21			
			Proporsi kursi DPRD yang diduduki perempuan	24%	30			
			Persentase Perempuan dalam Angkatan Kerja	35.18%	38.05			
			Persentase Jumlah Tenaga Kerja Wanita dibawah Umur	0.7%	0.1			
			Jumlah KDRT	5 Kasus	0			
			Angka melek huruf perempuan usia 10 tahun keatas	6,00%	8.50			
			Persentase Perempuan Bekerja di Sektor Non Pertanian	78.50%	83.75			
			Rasio KDRT	0.02	0.01			
			Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100%	100			
	Menurunnya jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I dari 23,64% menjadi 22,49%	Meningkatkan jumlah keluarga sejahtera	Rasio akseptor KB	69.66	80.87			
			Angka penggunaan kondom	1.9%	2.80			
			Rata-rata jumlah anak per keluarga	1.45 Orang	1.45			
			Laju pertumbuhan penduduk	2.98%	2.00			
			Cakupan peserta KB aktif	58,91%	63			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Meningkatkan ketahanan keluarga	Jumlah keluarga yang terlayani oleh kader Catur Bina / kader Posyandu	90 KK	428	Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

Misi	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja		Program	Bidang Urusan	SKPD
				Kondisi Awal 2010	Kondisi Akhir 2015			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Meningkatnya pengelolaan sumber daya kelautan Kabupaten Bintan	Menyusun struktur, pemanfaatan, dan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang berwawasan lingkungan	Persentase tutupan karang hidup	47%	70	Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan
			Luas padang lamun	2.600 Ha	3100			
			Jumlah kawasan konservasi dan jenis biota perairan dilindungi yang diidentifikasi dan dipetakan secara akurat	1 Kawasan	6	Program Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan
			Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kelautan	0 Perda	1			
Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup dari 51,65% menjadi 59,79%	Memenuhi kualitas lingkungan hidup daerah yang sesuai standar	Meningkatkan kualitas LH	Jumlah Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) yang disusun	7 SLHD	7	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya dan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup
			Persentase penduduk berakses air minum	93.81%	96.00			
		Meningkatkan kualitas LH	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air	50%	100	Program Pengawasan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup
			Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara.	30%	100			
			Prosentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan	25%	100			
			Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	100%	100			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Meningkatkan kualitas masyarakat dalam mengelola SDA dan LH	Jumlah kelompok masyarakat dan lembaga kemasyarakatan peduli Lingkungan Hidup	0 Kelompok	6	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup
			Jumlah kelompok masyarakat bersama Pemda yang terlibat dalam melaksanakan 3R (Reduce, Reuse, Recycle)	1 Kelompok	6			
		Meningkatkan pengendalian LH	Jumlah perusahaan yang mendapat pengawasan kinerja penataan pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas	30 Perusahaan	62	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup
			Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	20%	90			
	Meningkatnya persentase sampah yang ditangani dari 83,33% menjadi 88%	Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan	Persentase penanganan sampah	83.33%	88.00	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
			Persentase sampah yang dikelola	20.50%	45,00			
			Persentase volume pengurangan sampah melalui 3R	7.40%	12,00			
			Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	50	115	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Persampahan	Pekerjaan Umum	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
	Meningkatnya luas ruang terbuka hijau yang dikelola dari 1.500 M2 menjadi 17.226 M2	Meningkatkan/ Mempertahankan luas ruang terbuka hijau dan pengelolaan tempat pemakaman umum	Luas Ruang Terbuka Hijau yang dikelola	30% : 70%	30 : 70	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Penataan Ruang	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
			Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB di perkotaan	60% : 40%	60 : 40			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB di pedesaan	141.000 M2	144,000				
			Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk	104.72	106.72	Program Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum	Pekerjaan Umum	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	
	Menurunnya kerusakan hutan lindung dari 1658,8 Ha menjadi 9 Ha	Memantapkan dan meningkatkan upaya perlindungan hutan	Luas hutan yang ditanami kembali	0 Ha	200	Program Konservasi, Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan	Kehutanan	Dinas Pertanian dan Kehutanan	
			Terlaksananya pengendalian kebakaran hutan 6 HL	0 Kali	6				
			Jumlah tanaman mangrove yang di tanam	470 Ha / 1.938.600 Batang	1.070 / 4.083.600				
			Rasio luas kawasan tertutup pepohonan yang dilakukan dengan program reboisasi atau hutan rakyat	71.53%	74				
		Meningkatkan fungsi DAS	Rehabilitasi kawasan DAS 600 HA (total luas DAS 145.052,41 Ha)	0 Ha / 0 Batang	600 / 2.145.000	Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS)	Kehutanan	Dinas Pertanian dan Kehutanan	
			Jumlah dan Luas DAS dan Sub DAS yang rusak	74.722,17 Ha	74,122				
		Meningkatkan inventarisasi dan dokumentasi sumber daya hutan	Jumlah hutan lindung yang dikelola	Luas hutan lindung yang dirambah 6 HL: HI Sei Jago 13,92 Ha, HL Gn Kijang 28,2 Ha, HI Gn Lengkuas 240 Ha, HL Sei Pulai 200 Ha, HL Gn Bintang Besar 5 Ha, HL Gn Bintang Kecil 0,5 Ha	6 HL	6	Program Inventarisasi dan Pemetaan Sumber Daya hutan	Kehutanan	Dinas Pertanian dan Kehutanan
				Luas hutan lindung yang dirambah 6 HL: HI Sei Jago 13,92 Ha, HL Gn Kijang 28,2 Ha, HI Gn Lengkuas 240 Ha, HL Sei Pulai 200 Ha, HL Gn Bintang Besar 5 Ha, HL Gn Bintang Kecil 0,5 Ha	487,62 Ha	5.5			
				Jumlah penebangan liar: Sei Pulai 15 ha, Sei Jago 868,68 Ha, Gn Lengkuas 54 Ha, Gn Kijang 183 Ha, Gng Bintang Besar 3 Ha	1123,68 Ha	3			
				Jumlah kebakaran 6 HL : HI Sei Jago 30 Ha, HL Gn Kijang 5 Ha, HI Gn Lengkuas 10 Ha, HL Sei Pulai 2 Ha, HL Gn Bintang Kecil 0,5 Ha	47,5 Ha	0.5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Luas kawasan hutan lindung yang dilakukan tata batas	4.490.60 Ha	11,292			
			Kerusakan Kawasan Hutan	57%	46			
	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Peningkatan pengawasan dan pembinaan usaha pertambangan dan pemanfaatan sumber daya air	Reklamasi lahan pasca tambang (10.639 Ha)	5139 Ha	10,639	Program Pembinaan Usaha Pertambangan Umum dan Sumberdaya Mineral	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Pertambangan dan Energi
Perda tentang pemanfaatan air bawah tanah			0 Perda	1				
Persentase pelanggaran Perda tentang pembatasan pemanfaatan air bawah tanah			0%	10				
Perusahaan pertambangan yang diaudit			15 Perusahaan	15				
Peningkatan pembinaan dan pengawasan distribusi bahan bakar minyak dan gas bumi		Jumlah kios, agen, pangkalan, pengecer solar/bensin/minyak tanah yang dibina dan diawasi	233 Unit	274	Program Pembinaan dan Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Pertambangan dan Energi	
		Pertambangan tanpa ijin	0%	0				
		Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	11.02%	8.50				